

Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah di Kabupaten Jayapura

Ester^{1✉}, Agustinus Salle², Yundy Hafizrianda³, Elsyhan R. Marlissa⁴, Westim Ratang⁵, Ida Ayu Purba Riani⁶

Magister Keuangan Daerah, Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran belanja daerah Kabupaten Jayapura periode 2020–2024 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan metode campuran dengan desain sekuensial eksplanatori. Data kuantitatif bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui wawancara dengan lima informan yang terlibat dalam perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, dan akuntansi daerah. Data dianalisis menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi serta analisis tematik untuk menjelaskan hasil pengukuran kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas belanja daerah meningkat dari 78% pada 2020 menjadi 96% pada 2022, kemudian tetap berada dalam kategori efektif pada 2023 sebesar 95% dan 2024 sebesar 91%. Tingkat efisiensi berada pada kisaran 59%–69%, sehingga tergolong efisien hingga sangat efisien berdasarkan kriteria yang digunakan. Capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam kesesuaian antara anggaran dan realisasi belanja. Namun, pengelolaan anggaran masih dipengaruhi oleh perubahan prioritas akibat dinamika politik dan kondisi lapangan, keterlambatan pelaksanaan dan pengendalian belanja, kapasitas sumber daya manusia yang belum merata, serta koordinasi antarperangkat daerah yang belum optimal. Peningkatan kinerja anggaran memerlukan penguatan perencanaan terintegrasi, pengendalian pelaksanaan, peningkatan kompetensi aparatur, koordinasi antar-OPD, serta optimalisasi sistem informasi keuangan daerah.

Kata kunci: belanja daerah; efektivitas anggaran; efisiensi anggaran; keuangan daerah; Kabupaten Jayapura

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness and efficiency of regional expenditure budget management in Jayapura Regency during the 2020–2024 period and to identify the factors influencing its performance. The study employed a mixed-methods approach using a sequential explanatory design. Quantitative data were obtained from the Budget Realization Reports of the Jayapura Regency Government, while qualitative data were collected through interviews with five informants involved in regional planning, budgeting, treasury management, and accounting. The data were analyzed using effectiveness and efficiency ratios, followed by thematic analysis to explain the quantitative findings. The results show that the effectiveness level of regional expenditure increased from 78% in 2020 to 96% in 2022 and remained within the effective category at 95% in 2023 and 91% in 2024. The efficiency level ranged from 59% to 69%, indicating efficient to highly efficient performance based on the criteria applied. These findings demonstrate an improvement in the alignment between budget allocations and expenditure realization. However, budget management was still affected by changes in priorities arising from political dynamics and field conditions, delays in expenditure implementation and control, uneven human resource capacity, and suboptimal coordination among regional government agencies. Improving budget performance requires strengthening integrated planning, enhancing implementation control, increasing personnel competence, improving coordination among regional government agencies, and optimizing the use of regional financial information systems.

Keywords: budget effectiveness; budget efficiency; Jayapura Regency; regional expenditure; regional finance

✉ Corresponding author :

Email Address : esterpice847@gmail.com

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk menentukan prioritas pendapatan dan belanja sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam kerangka tersebut, anggaran belanja daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menjadi instrumen kebijakan yang menentukan kualitas pelayanan publik, penyediaan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan. Desentralisasi di Indonesia telah mendorong peningkatan investasi pemerintah daerah pada sektor kesehatan dan infrastruktur, terutama di daerah yang sebelumnya memiliki keterbatasan fasilitas publik. Namun, peningkatan kewenangan dan sumber daya fiskal tidak secara otomatis menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik apabila tidak disertai dengan kapasitas kelembagaan, tata kelola, dan pengalokasian belanja yang memadai (Kis-Katos & Sjahrir, 2017; Lewis, 2017).

Kinerja anggaran belanja daerah perlu dinilai setidaknya melalui dua dimensi utama, yaitu efektivitas dan efisiensi. Efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran dan mencapai target program yang telah ditetapkan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan kemampuan menghasilkan keluaran dan manfaat pembangunan melalui penggunaan sumber daya secara optimal. Kedua dimensi tersebut perlu dianalisis secara bersamaan karena tingkat penyerapan anggaran yang tinggi belum tentu mencerminkan pencapaian manfaat pembangunan, sementara realisasi anggaran yang rendah juga tidak dapat secara langsung diinterpretasikan sebagai bentuk penghematan. Kualitas belanja daerah lebih ditentukan oleh kesesuaian antara alokasi, realisasi, keluaran program, dan kebutuhan masyarakat. Temuan Masduki et al. (2022) menunjukkan bahwa kualitas belanja pemerintah daerah berkaitan dengan penurunan kemiskinan dan peningkatan pembangunan manusia. Dengan demikian, evaluasi anggaran tidak cukup hanya didasarkan pada besarnya belanja, tetapi juga harus mempertimbangkan ketepatan alokasi dan hasil yang dihasilkan.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia masih dihadapkan pada persoalan ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat. Transfer antarpemerintah memang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan kapasitas fiskal dan menjamin tersedianya pelayanan dasar. Namun, desain transfer juga dapat memengaruhi insentif pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, menentukan prioritas belanja, dan memperbaiki kualitas pelayanan publik (Lewis & Smoke, 2017). Akita et al. (2021) menemukan bahwa kesenjangan fiskal antardaerah di Indonesia masih cukup besar meskipun dana alokasi umum telah digunakan sebagai instrumen pemerataan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa besarnya transfer tidak selalu sejalan dengan peningkatan kemandirian fiskal maupun pemerataan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan.

Efektivitas dan efisiensi anggaran juga dipengaruhi oleh kualitas institusi lokal. Kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan praktik demokrasi lokal dapat menentukan kemampuan desentralisasi fiskal dalam meningkatkan penyediaan barang publik (Pal & Wahhaj, 2017). Sebaliknya, lemahnya akuntabilitas politik dapat mendorong belanja administratif yang berlebihan dan mengurangi ruang fiskal bagi program yang secara langsung memberikan manfaat kepada masyarakat (Sjahrir et al., 2014). Paranata (2022) juga menunjukkan bahwa kemandirian fiskal dan upaya pengendalian korupsi berperan dalam mengurangi risiko kebocoran anggaran pemerintah daerah. Penelitian yang lebih baru menegaskan bahwa tata kelola publik dapat memperbaiki kinerja keuangan pemerintah daerah, tetapi pengaruh tersebut dapat berubah ketika berhadapan dengan tekanan politik, budaya organisasi, dan kualitas pengelolaan risiko kecurangan (Safkaur et al., 2025). Oleh karena itu, analisis kinerja anggaran perlu mencakup faktor perencanaan, pengendalian, kapasitas sumber

daya manusia, koordinasi kelembagaan, dan lingkungan politik yang memengaruhi pelaksanaan anggaran.

Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks pada pemerintah daerah di Papua karena pengelolaan anggaran berlangsung dalam konteks desentralisasi asimetris dan kebijakan otonomi khusus. Dana otonomi khusus memberikan tambahan kapasitas fiskal untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Ginting (2023) menemukan bahwa dana otonomi khusus dan desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pelayanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan pada kabupaten/kota di Papua. Meskipun demikian, keberhasilannya membutuhkan partisipasi masyarakat, akuntabilitas penggunaan dana, sinergi kebijakan, dan koordinasi antarpemangku kepentingan. Selain itu, karakteristik geografis Papua menimbulkan biaya pembangunan yang tinggi. Saktina dan Khoirunnurrofik (2022) menunjukkan bahwa kondisi geografis dan tingginya indeks kemahalan konstruksi dapat memperlemah kemampuan dana otonomi khusus dalam meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian efisiensi anggaran di Papua perlu memperhatikan konteks geografis dan kelembagaan, bukan semata-mata membandingkan nilai anggaran dengan realisasinya.

Kabupaten Jayapura merupakan salah satu daerah yang menghadapi tantangan tersebut. Data anggaran dan realisasi APBD Kabupaten Jayapura periode 2020–2024 memperlihatkan bahwa struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer, sedangkan realisasi pendapatan asli daerah belum secara konsisten mencapai target yang ditetapkan. Pada sisi pengeluaran, belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan tingkat penyerapan yang relatif tinggi, sementara belanja modal memperlihatkan kesenjangan yang lebih besar antara anggaran dan realisasi. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pembiayaan kebutuhan rutin pemerintahan dan pembiayaan program pembangunan yang menghasilkan manfaat jangka panjang (BPKAD Kabupaten Jayapura, 2025). Rendahnya realisasi belanja modal dapat berhubungan dengan kualitas perencanaan, kesiapan pelaksanaan kegiatan, proses pengadaan barang dan jasa, kondisi geografis, perubahan kebijakan, serta kapasitas perangkat daerah.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan desentralisasi fiskal dengan investasi publik, pelayanan masyarakat, kesenjangan fiskal, kualitas belanja, dan kinerja pembangunan daerah. Namun, sebagian besar penelitian menggunakan data panel lintas daerah dan menilai dampak fiskal pada tingkat agregat atau pada sektor tertentu (Akita et al., 2021; Kis-Katos & Sjahrir, 2017; Lewis, 2017; Masduki et al., 2022). Penelitian tentang Papua juga lebih banyak menilai pengaruh dana otonomi khusus terhadap pelayanan publik, pembangunan manusia, atau penyediaan infrastruktur (Ginting, 2023; Saktina & Khoirunnurrofik, 2022). Kajian yang secara terpadu mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi belanja, menjelaskan faktor kelembagaan yang membentuk hasil pengukuran tersebut, serta merumuskan upaya perbaikan dalam konteks satu pemerintah kabupaten di Papua masih relatif terbatas. Berdasarkan pemetaan tersebut, terdapat ruang penelitian untuk menghubungkan hasil pengukuran kinerja anggaran dengan penjelasan empiris dari aparatur yang terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan APBD.

Penelitian ini menawarkan kebaruan berupa integrasi analisis kuantitatif dan kualitatif untuk mengevaluasi pengelolaan anggaran belanja daerah Kabupaten Jayapura selama periode 2020–2024. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengukur perkembangan rasio efektivitas dan efisiensi belanja daerah, sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang membentuk capaian tersebut, meliputi kualitas perencanaan, konsistensi pelaksanaan dan pengendalian anggaran, kapasitas sumber daya manusia, koordinasi kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi informasi. Integrasi kedua pendekatan tersebut memungkinkan penelitian tidak hanya menghasilkan klasifikasi kinerja keuangan, tetapi juga memberikan penjelasan mengenai proses dan kondisi kelembagaan yang melatarbelakanginya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran belanja daerah Kabupaten Jayapura, mengidentifikasi faktor-faktor yang membentuk kedua aspek tersebut, serta merumuskan upaya peningkatan kualitas pengelolaan anggaran. Secara akademik, penelitian ini memperluas kajian pengelolaan keuangan daerah dengan menempatkan efektivitas dan efisiensi sebagai hasil interaksi antara kapasitas fiskal, tata kelola, kelembagaan, dan karakteristik wilayah. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi dasar evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam memperkuat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan akuntabilitas belanja daerah yang lebih berorientasi pada hasil pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

LANDASAN TEORI

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah mencakup rangkaian kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan, dan evaluasi keuangan pemerintah daerah. Dalam kerangka desentralisasi, pemerintah daerah memperoleh kewenangan untuk mengalokasikan sumber daya fiskal berdasarkan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat setempat. Meskipun demikian, kewenangan fiskal yang besar tidak selalu menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik apabila tidak didukung kapasitas kelembagaan, akuntabilitas, dan kualitas perencanaan anggaran.

Kualitas pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menghubungkan anggaran dengan target pembangunan, mengendalikan pelaksanaan program, dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya kepada masyarakat. Pal dan Wahhaj (2017) menunjukkan bahwa manfaat desentralisasi fiskal dalam penyediaan barang publik sangat dipengaruhi oleh kualitas institusi lokal. Selain itu, struktur politik daerah dapat memengaruhi komposisi belanja dan mendorong pengeluaran administratif yang berlebihan apabila mekanisme akuntabilitas tidak berjalan secara efektif (Sjahrir et al., 2014).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. APBD berfungsi sebagai instrumen perencanaan, pengendalian, distribusi sumber daya, dan pertanggungjawaban publik. Oleh karena itu, kualitas APBD tidak hanya dinilai berdasarkan keseimbangan antara pendapatan dan belanja, tetapi juga berdasarkan kemampuan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Dalam sistem desentralisasi Indonesia, APBD pemerintah daerah masih banyak dipengaruhi oleh transfer dari pemerintah pusat. Transfer tersebut diperlukan untuk mengurangi kesenjangan kemampuan fiskal, tetapi dapat menimbulkan ketergantungan dan melemahkan insentif daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah apabila tidak dirancang dengan baik. Lewis dan Smoke (2017) menjelaskan bahwa sistem transfer antarpemerintah dapat memengaruhi perilaku pemerintah daerah dalam pengumpulan pendapatan, penetapan belanja, dan pengelolaan sisa anggaran.

Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan. Secara umum, belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga. Belanja operasi mendukung kegiatan rutin pemerintah dan pelayanan jangka pendek, sedangkan belanja modal digunakan untuk memperoleh aset dan infrastruktur yang memberikan manfaat lebih dari satu periode anggaran.

Komposisi belanja menjadi penting karena peningkatan jumlah pengeluaran belum tentu menghasilkan peningkatan pelayanan publik. Lewis (2017) menemukan bahwa besarnya sumber daya fiskal pemerintah daerah di Indonesia tidak selalu diikuti oleh perbaikan

pelayanan apabila pengeluaran tidak dialokasikan dan dikelola secara tepat. Sementara itu, Masduki et al. (2022) menunjukkan bahwa kualitas belanja daerah, bukan semata-mata besarnya anggaran, memiliki hubungan penting dengan pengurangan kemiskinan dan peningkatan pembangunan manusia.

Efektivitas Pengelolaan Anggaran

Efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan anggaran, efektivitas berkaitan dengan kesesuaian antara anggaran yang direncanakan, realisasi belanja, keluaran program, dan hasil pembangunan. Semakin dekat realisasi dan hasil program terhadap target yang ditentukan, semakin efektif pengelolaan anggaran tersebut.

Penyerapan anggaran yang tinggi tidak selalu dapat diartikan sebagai kinerja yang efektif. Realisasi belanja perlu dihubungkan dengan manfaat yang diterima masyarakat dan pencapaian indikator program. Kis-Katos dan Sjahrir (2017) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan investasi publik daerah, tetapi pengaruhnya bergantung pada desain kelembagaan dan proses politik daerah. Dengan demikian, evaluasi efektivitas perlu mempertimbangkan tidak hanya persentase realisasi anggaran, tetapi juga ketepatan sasaran, waktu pelaksanaan, dan pencapaian hasil program.

Dalam penelitian ini, efektivitas pengelolaan belanja daerah dipahami sebagai kemampuan Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam merealisasikan anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran kuantitatif dilakukan melalui perbandingan antara realisasi belanja dan anggaran belanja, sedangkan penjelasan kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi faktor yang menyebabkan tercapai atau tidak tercapainya target tersebut.

Efisiensi Pengelolaan Anggaran

Efisiensi menggambarkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan keluaran dan manfaat tertentu dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Dalam sektor publik, efisiensi tidak hanya berarti mengurangi pengeluaran, tetapi memastikan bahwa setiap sumber daya yang digunakan menghasilkan manfaat publik yang sebanding. Pemerintah daerah dapat dinilai efisien apabila mampu melaksanakan program dengan biaya yang terkendali tanpa menurunkan kualitas pelayanan dan pencapaian target.

Efisiensi belanja dipengaruhi oleh struktur pengeluaran, kualitas perencanaan, pengadaan barang dan jasa, kapasitas aparatur, dan kondisi wilayah. Pada daerah dengan tingkat kemahalan konstruksi dan hambatan geografis yang tinggi, jumlah output yang dapat dihasilkan dari anggaran tertentu dapat lebih rendah dibandingkan daerah lain. Saktina dan Khoirunnurrofik (2022) menunjukkan bahwa tingginya biaya konstruksi di Papua memperlemah kemampuan dana otonomi khusus dalam meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan. Oleh karena itu, interpretasi efisiensi anggaran Kabupaten Jayapura perlu mempertimbangkan karakteristik geografis dan biaya pelaksanaan pembangunan.

Dalam penelitian ini, efisiensi digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan penggunaan belanja dan mengalokasikan anggaran bagi kegiatan yang memberikan manfaat pembangunan. Pengukuran rasio keuangan selanjutnya diperkuat dengan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian anggaran, dan hambatan administratif yang ditemukan melalui wawancara.

Penelitian Terdahulu dan Kesenjangan Penelitian

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan antara desentralisasi fiskal, belanja pemerintah, dan pelayanan publik belum menghasilkan temuan yang sepenuhnya konsisten. Lewis (2017) menemukan bahwa besarnya pengeluaran daerah tidak selalu memperbaiki kualitas pelayanan. Sebaliknya, Kis-Katos dan Sjahrir (2017) menunjukkan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan investasi publik daerah. Perbedaan tersebut menegaskan bahwa hasil

pengelolaan anggaran sangat dipengaruhi oleh kualitas institusi, komposisi belanja, kapasitas pemerintah, dan kondisi wilayah.

Dalam konteks Papua, hasil penelitian juga menunjukkan temuan yang beragam. Cahyaningsih dan Fitradhy (2019) menemukan bahwa desentralisasi fiskal asimetris belum memberikan perbaikan yang diharapkan terhadap hasil pendidikan dan kesehatan di Papua. Sebaliknya, Ginting (2023) menunjukkan bahwa dana otonomi khusus dan desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, tetapi keberhasilannya memerlukan partisipasi masyarakat, akuntabilitas, serta koordinasi antarpemangku kepentingan.

Sebagian besar studi terdahulu menggunakan data panel lintas daerah dan berfokus pada pengaruh desentralisasi atau belanja terhadap indikator pembangunan. Kajian yang secara bersamaan mengukur efektivitas dan efisiensi belanja serta menjelaskan faktor kelembagaan yang melatarbelakangi hasil pengukuran pada satu pemerintah kabupaten di Papua masih terbatas. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut melalui integrasi analisis rasio keuangan periode 2020–2024 dengan analisis kualitatif mengenai perencanaan, pelaksanaan, sumber daya manusia, koordinasi kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi informasi di Kabupaten Jayapura.

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menempatkan efektivitas dan efisiensi sebagai dua dimensi utama kinerja pengelolaan anggaran belanja daerah. Efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah merealisasikan anggaran dan mencapai target, sedangkan efisiensi menggambarkan kemampuan menggunakan sumber daya anggaran secara optimal. Kedua dimensi tersebut dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, konsistensi pelaksanaan dan pengendalian, kapasitas sumber daya manusia, koordinasi kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Secara konseptual, perencanaan yang terintegrasi menghasilkan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Pelaksanaan dan pengendalian yang konsisten meningkatkan ketercapaian program, sedangkan aparatur yang kompeten dan koordinasi yang baik dapat mengurangi keterlambatan serta kesalahan pengelolaan. Pemanfaatan sistem informasi selanjutnya mendukung ketepatan data, transparansi, dan pengawasan anggaran. Interaksi faktor-faktor tersebut menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran belanja daerah Kabupaten Jayapura.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran dengan desain sequential explanatory atau sekuensial eksplanatori. Desain ini dilaksanakan dalam dua tahap yang berurutan, yaitu analisis kuantitatif yang dilanjutkan dengan analisis kualitatif atau dapat dinotasikan sebagai QUAN → qual. Tahap kuantitatif digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran belanja daerah, sedangkan tahap kualitatif digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi hasil pengukuran tersebut.

Pendekatan metode campuran dipilih karena pengukuran rasio keuangan belum cukup untuk menjelaskan proses kelembagaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran. Kombinasi data kuantitatif dan kualitatif memungkinkan penelitian menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh dibandingkan penggunaan satu pendekatan saja (Schoonenboom & Johnson, 2017). Integrasi kedua jenis data dilakukan pada tahap interpretasi, yaitu dengan menggunakan hasil wawancara untuk menjelaskan perubahan dan kecenderungan rasio keuangan selama periode penelitian (Fetters et al., 2013).

Lokasi dan Periode Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Lokasi ini dipilih karena Kabupaten Jayapura memiliki karakteristik geografis yang luas,

ketergantungan fiskal terhadap pendapatan transfer, serta dinamika realisasi pendapatan dan belanja daerah yang penting untuk dievaluasi. Analisis kuantitatif menggunakan data APBD selama lima tahun anggaran, yaitu 2020–2024, sedangkan data kualitatif diperoleh dari aparatur yang terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban anggaran daerah.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder meliputi anggaran dan realisasi belanja daerah yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura periode 2020–2024. Dokumen pendukung lainnya berupa laporan keuangan pemerintah daerah, dokumen perencanaan pembangunan, dan data statistik daerah yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayapura.

Data primer diperoleh melalui wawancara semiterstruktur dengan aparatur pemerintah daerah yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan APBD. Data tersebut digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang membentuk efektivitas dan efisiensi anggaran serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan belanja daerah.

Informan Penelitian

Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan kewenangan, pengalaman, dan penguasaan informasi yang relevan dengan pengelolaan anggaran daerah. Teknik ini sesuai untuk memperoleh informasi mendalam dari individu yang memahami fenomena yang diteliti (Palinkas et al., 2015).

Penelitian melibatkan lima informan, yaitu Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran, Sekretaris Bappeda, Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Bidang Anggaran, dan Kepala Bidang Akuntansi. Identitas personal informan disamarkan menggunakan inisial untuk menjaga kerahasiaan, sedangkan jabatan dicantumkan untuk menunjukkan relevansi sumber informasi.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Dokumentasi dilakukan dengan menghimpun data anggaran dan realisasi belanja daerah, laporan keuangan, serta dokumen perencanaan dan evaluasi APBD. Data tersebut selanjutnya diperiksa berdasarkan tahun anggaran dan jenis belanja untuk menjamin konsistensi pencatatan.

Wawancara dilakukan secara semiterstruktur dengan menggunakan pedoman yang memuat pertanyaan mengenai perencanaan anggaran, mekanisme pelaksanaan dan penyaluran dana, pengendalian belanja, kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antarperangkat daerah, pemanfaatan sistem informasi, serta faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan APBD. Observasi digunakan untuk memperoleh informasi pendukung mengenai proses administrasi dan koordinasi pengelolaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Definisi dan Pengukuran Variabel

Efektivitas belanja daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan belanja berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan. Efektivitas dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Mahsun (2019)

Hasil perhitungan diklasifikasikan sebagai berikut: rasio di atas 100% dikategorikan sangat efektif; 90%–100% efektif; 80%–<90% cukup efektif; 60%–<80% kurang efektif; dan kurang dari 60% tidak efektif.

Efisiensi belanja daerah dalam penelitian ini diproksikan melalui perbandingan antara realisasi belanja langsung dengan total realisasi belanja daerah. Rasio tersebut digunakan untuk menggambarkan proporsi pengeluaran yang dialokasikan bagi pelaksanaan program dan kegiatan dibandingkan keseluruhan pengeluaran daerah. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Mahsun (2017)

Kriteria yang digunakan yaitu rasio di atas 100% dikategorikan tidak efisien; 90%–100% kurang efisien; 80%–<90% cukup efisien; 60%–<80% efisien; dan kurang dari 60% sangat efisien. Hasil rasio tidak hanya diinterpretasikan secara numerik, tetapi juga dijelaskan berdasarkan struktur belanja, kondisi geografis, proses pengadaan, kapasitas aparatur, dan pelaksanaan program daerah.

Analisis Data Kuantitatif

Data kuantitatif dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan rasio keuangan. Tahap pertama dilakukan dengan memeriksa kesesuaian data antara anggaran dan realisasi pada setiap tahun. Tahap kedua menghitung rasio efektivitas dan efisiensi untuk periode 2020–2024. Tahap ketiga mengklasifikasikan hasil perhitungan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Hasil analisis disajikan dalam tabel dan grafik perkembangan tahunan. Perubahan rasio dibandingkan antartahun untuk mengidentifikasi kecenderungan peningkatan, penurunan, atau fluktuasi kinerja pengelolaan anggaran belanja daerah.

Analisis Data Kualitatif

Data wawancara dianalisis menggunakan analisis tematik. Analisis ini dilakukan melalui tahapan memahami data, memberikan kode, mengelompokkan kode, menyusun tema, meninjau hubungan antartema, dan menginterpretasikan temuan (Braun & Clarke, 2006). Tema awal disusun berdasarkan fokus penelitian, yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengendalian belanja, kapasitas sumber daya manusia, koordinasi kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Rekaman atau catatan wawancara ditranskripsikan dan dibaca secara menyeluruh. Pernyataan yang relevan diberi kode, kemudian dikelompokkan berdasarkan kesamaan makna. Tema yang terbentuk dibandingkan antar-informan dan dicocokkan dengan dokumen anggaran. Proses analisis didokumentasikan secara sistematis untuk menjaga transparansi dan keterlacakan interpretasi sebagaimana dianjurkan oleh Nowell et al. (2017).

Integrasi dan Keabsahan Data

Integrasi data dilakukan dengan menghubungkan hasil perhitungan rasio dengan hasil wawancara. Temuan kualitatif digunakan untuk menjelaskan mengapa tingkat efektivitas atau efisiensi meningkat, menurun, atau berfluktuasi pada tahun tertentu. Integrasi disajikan melalui uraian naratif dan matriks yang mempertemukan hasil kuantitatif dengan tema-tema kualitatif.

Keabsahan temuan diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode. Informasi dari lima informan dibandingkan satu sama lain dan diverifikasi menggunakan laporan realisasi anggaran serta dokumen perencanaan. Kesimpulan akhir ditetapkan berdasarkan pola yang konsisten antara hasil pengukuran kuantitatif, keterangan informan, dan bukti dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Realisasi Belanja Daerah

Data Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah Kabupaten Jayapura meningkat dari Rp1,078 triliun pada 2020 menjadi Rp1,515 triliun pada 2024. Meskipun meningkat secara nominal, kemampuan merealisasikan belanja berfluktuasi selama periode penelitian. Perbedaan paling besar terlihat pada belanja modal, dengan tingkat realisasi sebesar 57,70% pada 2020, meningkat menjadi 91,85% pada 2022, kemudian menurun menjadi 77,36% pada 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja pembangunan masih lebih tidak stabil dibandingkan belanja operasi.

Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah

Tabel 1. Tingkat efektivitas belanja daerah Kabupaten Jayapura, 2020–2024

Tahun	Realisasi belanja (Rp)	Anggaran belanja (Rp)	Efektivitas	Kriteria
2020	1.078.406.055.964,06	1.382.986.790.120,34	78%	Kurang efektif
2021	1.306.854.054.411,19	1.468.927.783.007,27	89%	Cukup efektif
2022	1.456.501.945.138,81	1.510.563.114.987,00	96%	Efektif
2023	1.456.647.393.277,09	1.532.545.875.426,00	95%	Efektif
2024	1.515.427.984.455,11	1.673.805.377.787,00	91%	Efektif

Sumber: LRA Pemerintah Kabupaten Jayapura, diolah, 2025.

Tingkat efektivitas meningkat dari 78% pada 2020 menjadi 96% pada 2022. Capaian tersebut kemudian sedikit menurun menjadi 95% pada 2023 dan 91% pada 2024, tetapi tetap berada dalam kategori efektif. Rata-rata efektivitas selama lima tahun mencapai 89,8% atau mendekati kategori efektif. Hasil ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kesesuaian antara anggaran dan realisasi, walaupun konsistensinya belum sepenuhnya terjaga.

Rendahnya efektivitas pada 2020 terutama berkaitan dengan rendahnya realisasi belanja modal, khususnya belanja jalan, jaringan, dan irigasi. Sebaliknya, tingginya efektivitas pada 2022 didukung oleh realisasi belanja operasi sebesar 97,62% dan belanja modal sebesar 91,85%. Penurunan pada 2024 berhubungan dengan melemahnya realisasi belanja modal menjadi 77,36%, terutama pada gedung dan bangunan serta aset tetap lainnya.

Temuan ini mendukung Lewis (2017), yang menunjukkan bahwa besarnya sumber daya fiskal pemerintah daerah tidak secara otomatis memperbaiki pelayanan apabila kapasitas pelaksanaan dan kualitas alokasi belanja belum memadai. Hasil penelitian juga sejalan dengan Kis-Katos dan Sjahir (2017), bahwa desentralisasi dapat meningkatkan investasi publik, tetapi hasilnya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah mengalokasikan dan melaksanakan anggaran. Dengan demikian, efektivitas tidak cukup dinilai berdasarkan tingginya penyerapan, tetapi perlu dihubungkan dengan kualitas program dan manfaat yang diterima masyarakat.

Efisiensi Pengelolaan Belanja Daerah

Tabel 2. Tingkat efisiensi belanja daerah Kabupaten Jayapura, 2020–2024

Tahun	Realisasi belanja langsung (Rp)	Total realisasi belanja (Rp)	Rasio efisiensi	Kategori
2020	740.262.800.733,55	1.078.406.055.964,06	69%	Efisien
2021	820.660.387.312,50	1.306.854.054.411,19	63%	Efisien
2022	860.600.889.572,31	1.456.501.945.138,81	59%	Sangat efisien
2023	934.018.183.340,06	1.456.647.393.277,09	64%	Efisien
2024	976.090.176.970,30	1.515.427.984.455,11	64%	Efisien

Sumber: LRA Pemerintah Kabupaten Jayapura, diolah, 2025.

Rasio efisiensi berada pada kisaran 59%–69%, dengan rata-rata 63,8%. Berdasarkan kriteria yang digunakan dalam penelitian, pengelolaan belanja daerah tergolong efisien, bahkan sangat efisien pada 2022. Stabilitasnya rasio pada 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa proporsi belanja yang digunakan sebagai dasar pengukuran relatif dapat dikendalikan.

Meskipun demikian, hasil tersebut perlu ditafsirkan secara hati-hati. Rasio yang digunakan membandingkan realisasi belanja langsung dengan total realisasi belanja, sehingga

lebih menggambarkan komposisi belanja daripada efisiensi teknis berbasis keluaran. Oleh karena itu, rasio yang lebih rendah belum secara otomatis membuktikan bahwa pemerintah menghasilkan pelayanan yang lebih banyak atau lebih baik. Pengukuran efisiensi yang lebih kuat memerlukan data biaya per keluaran, capaian indikator program, atau outcome pelayanan publik.

Interpretasi tersebut sejalan dengan Masduki et al. (2022), yang menemukan bahwa dampak belanja daerah terhadap kemiskinan dan pembangunan manusia lebih ditentukan oleh kualitas pengeluaran daripada sekadar besarnya anggaran. Lewis (2017) juga menunjukkan adanya kemungkinan penurunan manfaat ketika peningkatan belanja tidak diikuti kapasitas pelaksanaan yang memadai. Dengan demikian, kategori efisien dalam penelitian ini harus dibaca bersama dengan capaian program, realisasi belanja modal, dan hasil pembangunan.

Faktor Pembentuk Efektivitas dan Efisiensi

Hasil wawancara mengidentifikasi lima tema utama yang membentuk kinerja pengelolaan belanja daerah.

Tabel 3. Temuan kualitatif pengelolaan anggaran belanja daerah

Faktor	Temuan utama	Dampak terhadap anggaran
Perencanaan dan kualitas data	APBD telah mengacu pada RPJMD dan RKPD, tetapi prioritas dapat berubah karena aspirasi politik, usulan masyarakat, dan data sektoral yang belum sinkron	Program mengalami penyesuaian dan berpotensi tidak sepenuhnya sesuai kebutuhan riil
Pelaksanaan dan pengendalian	Pengadaan, kelengkapan dokumen, pencairan dana, dan pelaksanaan kegiatan sering terlambat	Realisasi menumpuk pada triwulan III dan IV
Kapasitas SDM	Kemampuan penyusunan anggaran berbasis kinerja, analisis anggaran, dan pengoperasian aplikasi belum merata	Proses verifikasi, pencairan, dan pelaporan menjadi lebih lambat
Kelembagaan dan koordinasi	Struktur pengelolaan sudah tersedia, tetapi koordinasi BPKAD, Bappeda, dan OPD belum konsisten	Ketidaksinkronan program, keterlambatan, dan risiko tumpang tindih kegiatan
Teknologi informasi	Sistem monitoring telah digunakan, tetapi integrasi dan kemampuan pengguna masih terbatas	Pemantauan membaik, tetapi manfaat sistem belum optimal

Sumber: Hasil wawancara, diolah, 2025.

Perencanaan dan kualitas data

Perencanaan anggaran pada dasarnya telah diselaraskan dengan RPJMD dan RKPD. Namun, informan menyatakan bahwa perubahan aspirasi dan kepentingan politik dapat menggeser prioritas yang telah ditetapkan. Selain itu, ketidaksinkronan data sektoral menyebabkan penyusunan program belum sepenuhnya didasarkan pada informasi yang terintegrasi.

Temuan ini sejalan dengan Sjahrir et al. (2014), yang menunjukkan bahwa politik lokal dapat memengaruhi komposisi pengeluaran dan mendorong belanja administratif yang berlebihan. Pal dan Wahhaj (2017) juga menegaskan bahwa manfaat desentralisasi fiskal ditentukan oleh kualitas institusi lokal. Artinya, keterlibatan masyarakat tetap diperlukan, tetapi aspirasi harus diseleksi melalui indikator kebutuhan, data sektoral, dan target pembangunan yang terukur.

Pelaksanaan dan pengendalian belanja

Hasil wawancara menunjukkan bahwa realisasi anggaran cenderung meningkat pada triwulan III dan IV. Keterlambatan tersebut dipengaruhi oleh proses pengadaan, perubahan

program, ketidaklengkapan dokumen pertanggungjawaban, dan keterlambatan pencairan. Salah satu informan menyatakan bahwa “rata-rata serapan belanja lebih banyak di triwulan III dan IV” karena mekanisme pengadaan dan administrasi membutuhkan waktu cukup lama.

Penumpukan belanja pada akhir tahun dapat mengurangi waktu pelaksanaan, membatasi pengawasan, dan meningkatkan risiko kegiatan hanya berorientasi pada penyerapan. Temuan ini mendukung Afiah dan Azwari (2015), yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berperan dalam meningkatkan kualitas pelaporan dan tata kelola pemerintah daerah. Paranata (2022) juga menegaskan pentingnya pengendalian, kemandirian fiskal, dan pencegahan kebocoran dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran.

Kapasitas sumber daya manusia

Kompetensi aparatur belum merata, terutama dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, analisis belanja, penggunaan aplikasi keuangan, dan verifikasi dokumen. Sejumlah pegawai masih lebih berorientasi pada pemenuhan administrasi daripada hubungan antara anggaran, indikator kinerja, dan hasil program.

Hasil ini konsisten dengan Usman et al. (2021), yang menemukan bahwa kualitas modal manusia memengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah dan berinteraksi dengan sistem pengendalian manajemen. Dengan demikian, pelatihan tidak cukup hanya berisi pengenalan regulasi, tetapi perlu mencakup praktik analisis anggaran, penetapan indikator, evaluasi biaya, penggunaan aplikasi, dan penyelesaian kasus pengelolaan belanja.

Kelembagaan dan koordinasi antar-OPD

Struktur kelembagaan pengelolaan APBD telah menjalankan fungsi masing-masing, tetapi koordinasi lintas bidang belum berlangsung secara intensif. Lemahnya sinkronisasi antara perencanaan, pengelola kas, perangkat pelaksana, dan unit akuntansi dapat menyebabkan keterlambatan dokumen, perubahan kegiatan, dan ketidaksesuaian jadwal pencairan.

Temuan tersebut menguatkan Pal dan Wahhaj (2017), bahwa institusi lokal menentukan keberhasilan penyediaan barang publik dalam sistem desentralisasi. Dalam konteks Papua, Ginting (2023) juga menemukan bahwa manfaat dana otonomi khusus bagi pelayanan publik membutuhkan akuntabilitas, partisipasi, sinergi, dan koordinasi antarpemangku kepentingan.

Kondisi geografis

Walaupun tidak muncul sebagai tema administratif utama, kondisi geografis Kabupaten Jayapura turut memengaruhi biaya, waktu, dan akses pelaksanaan program. Faktor ini terutama relevan terhadap realisasi belanja modal dan pembangunan infrastruktur. Saktina dan Khoirunnurrofik (2022) menunjukkan bahwa tingginya biaya konstruksi dapat memperlemah kontribusi dana otonomi khusus terhadap penyediaan jalan di Papua. Oleh sebab itu, keterlambatan atau rendahnya realisasi belanja modal tidak selalu disebabkan oleh kelemahan administrasi, tetapi juga dapat berkaitan dengan biaya logistik dan karakteristik wilayah.

Upaya Peningkatan Pengelolaan Anggaran

Tabel 4. Strategi peningkatan efektivitas dan efisiensi

Strategi	Tindakan utama
Penguatan perencanaan terintegrasi	Menyelaraskan APBD dengan RPJMD dan RKPD, memperbaiki basis data sektoral, serta melakukan review internal
Pengendalian pelaksanaan	Menetapkan target realisasi bulanan atau triwulanan, mempercepat pengadaan, dan menindaklanjuti deviasi secara berkala
Peningkatan kapasitas SDM	Pelatihan berbasis praktik, mentoring, sertifikasi, dan pendampingan penggunaan sistem informasi
Penguatan koordinasi	Forum lintas OPD, sinkronisasi jadwal, pembagian tanggung jawab, dan rekonsiliasi data secara rutin

Optimalisasi teknologi informasi	Integrasi data perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, dan pelaporan dalam sistem monitoring
Orientasi pada hasil	Menghubungkan realisasi anggaran dengan output, outcome, kualitas layanan, dan manfaat bagi masyarakat

Sumber: Hasil wawancara, diolah, 2025.

Upaya peningkatan perlu dimulai dengan memperkuat keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan indikator kinerja. Perubahan program tetap dapat dilakukan, tetapi harus didukung data, analisis kebutuhan, dan penjelasan mengenai pengaruhnya terhadap target pembangunan. Langkah ini dapat mengurangi program yang bersifat reaktif dan tidak terhubung dengan prioritas jangka menengah.

Monitoring juga perlu diarahkan untuk mencegah penumpukan belanja di akhir tahun. Pemerintah daerah dapat menetapkan target realisasi setiap triwulan, mempercepat persiapan pengadaan, dan membangun mekanisme peringatan dini terhadap keterlambatan. Sistem informasi keuangan selanjutnya digunakan tidak hanya untuk pencatatan, tetapi juga untuk analisis deviasi dan pengambilan keputusan.

Dalam konteks dana transfer dan otonomi khusus, tingginya realisasi anggaran harus disertai akuntabilitas penggunaan dan ukuran manfaat. Ginting (2023) menegaskan bahwa dana otonomi khusus dapat meningkatkan pelayanan publik apabila disertai pengawasan, koordinasi, dan partisipasi masyarakat. Karena itu, keberhasilan pengelolaan belanja Kabupaten Jayapura sebaiknya tidak berhenti pada kategori efektif dan efisien secara rasio, tetapi diarahkan pada peningkatan pelayanan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas belanja Kabupaten Jayapura cenderung membaik, sedangkan rasio efisiensi relatif stabil. Namun, kualitas pengelolaan masih dipengaruhi ketidaksinkronan data, perubahan prioritas, keterlambatan pelaksanaan, kesenjangan kompetensi SDM, dan koordinasi antar-OPD. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kinerja anggaran tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana, tetapi oleh kemampuan institusi daerah mengubah sumber daya fiskal menjadi hasil pembangunan.

SIMPULAN

Pengelolaan anggaran belanja daerah Kabupaten Jayapura selama periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Tingkat efektivitas meningkat dari 78% pada 2020 menjadi 96% pada 2022 dan tetap berada di atas 90% pada 2023–2024. Sementara itu, tingkat efisiensi berada pada kisaran 59%–69%, sehingga termasuk kategori efisien hingga sangat efisien. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin mampu merealisasikan anggaran sesuai dengan rencana dan mengendalikan penggunaan sumber daya keuangan. Meskipun demikian, pengelolaan anggaran masih menghadapi sejumlah kendala, terutama perubahan prioritas akibat dinamika politik, keterlambatan pencairan dan penumpukan realisasi pada akhir tahun, ketimpangan kompetensi aparatur, serta belum optimalnya koordinasi antar-OPD dan pemanfaatan sistem informasi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pengelolaan anggaran perlu dilakukan melalui penguatan perencanaan terintegrasi, pengendalian pelaksanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi kelembagaan, dan optimalisasi teknologi informasi.

Pemerintah Kabupaten Jayapura perlu menjaga konsistensi antara APBD dengan RPJMD dan RKPD serta memperkuat monitoring realisasi fisik dan keuangan secara berkala. Pengendalian belanja perlu dilakukan lebih ketat untuk mencegah pembengkakan pengeluaran dan penumpukan pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun. Selain itu, peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan teknis di bidang perencanaan, penganggaran, pengelolaan kas, dan penggunaan aplikasi keuangan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan. Koordinasi antar-OPD juga perlu diperkuat melalui forum evaluasi rutin dan didukung sistem informasi keuangan yang terintegrasi agar realisasi anggaran dapat dipantau secara cepat, akurat, dan berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan.

Referensi :

- Afiah, N. N., & Azwari, P. C. (2015). The effect of the implementation of government internal control system (GICS) on the quality of financial reporting of the local government and its impact on the principles of good governance. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 211, 811–818. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.172>
- Akita, T., Riadi, A. A., & Rizal, A. (2021). Fiscal disparities in Indonesia in the decentralization era: Does general allocation fund equalize fiscal revenues? *Regional Science Policy & Practice*, 13(6), 1842–1865. <https://doi.org/10.1111/rsp3.12326>
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura. (2025). *Data anggaran dan realisasi APBD Kabupaten Jayapura tahun 2020–2024* [Dokumen internal].
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Cahyaningsih, A., & Fitradhy, A. (2019). The impact of asymmetric fiscal decentralization on education and health outcomes: Evidence from Papua Province, Indonesia. *Economics & Sociology*, 12(2), 48–63. <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-2/3>
- Fetters, M. D., Curry, L. A., & Creswell, J. W. (2013). Achieving integration in mixed methods designs—Principles and practices. *Health Services Research*, 48(6 Pt. 2), 2134–2156. <https://doi.org/10.1111/1475-6773.12117>
- Ginting, A. M. (2023). The role of the special autonomy fund to improve the public service in the Papua Province. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 14(1), 47–60. <https://doi.org/10.22212/jekp.v14i1.3925>
- Kis-Katos, K., & Sjahrir, B. S. (2017). The impact of fiscal and political decentralization on local public investment in Indonesia. *Journal of Comparative Economics*, 45(2), 344–365. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2017.03.003>
- Lewis, B. D. (2017). Local government spending and service delivery in Indonesia: The perverse effects of substantial fiscal resources. *Regional Studies*, 51(11), 1695–1707. <https://doi.org/10.1080/00343404.2016.1216957>
- Lewis, B. D., & Smoke, P. (2017). Intergovernmental fiscal transfers and local incentives and responses: The case of Indonesia. *Fiscal Studies*, 38(1), 111–139. <https://doi.org/10.1111/1475-5890.12080>
- Masduki, U., Rindayati, W., & Mulatsih, S. (2022). How can quality regional spending reduce poverty and improve human development index? *Journal of Asian Economics*, 82, 101515. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2022.101515>
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Pal, S., & Wahhaj, Z. (2017). Fiscal decentralisation, local institutions and public good provision: Evidence from Indonesia. *Journal of Comparative Economics*, 45(2), 383–409. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2016.07.004>
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Paranata, A. (2022). The miracle of anti-corruption efforts and regional fiscal independence in plugging budget leakage: Evidence from western and eastern Indonesia. *Heliyon*, 8(10), e11153. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11153>
- Safkaur, O., Hanasbey, L., & Sakti, E. (2025). The role of politic pressure, fraud risk management and culture organization in moderating public governance on Indonesia local government financial performance. *Pacific Accounting Review*, 37(3), 455–476. <https://doi.org/10.1108/PAR-08-2024-0183>

- Saktina, R. J., & Khoirunnurrofik, K. (2022). The effect of geographical conditions on the role of the Special Autonomy Fund for the availability of road infrastructure in Papua. *Jurnal Bina Praja*, 14(1), 111–122. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.111-122>
- Schoonenboom, J., & Johnson, R. B. (2017). How to construct a mixed methods research design. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 69(Suppl. 2), 107–131. <https://doi.org/10.1007/s11577-017-0454-1>
- Sjahrir, B. S., Kis-Katos, K., & Schulze, G. G. (2014). Administrative overspending in Indonesian districts: The role of local politics. *World Development*, 59, 166–183. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.01.008>
- Usman, A., Wirawan, H., & Zulkifli. (2021). The effect of human capital and physical capital on regional financial condition: The moderating effect of management control system. *Heliyon*, 7(5), e06945. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06945>